



Peran ATR/BPN Dalam Pengelolaan Pertanahan di Kantor ATR/BPN Kota Sukabumi

Gevira Halimatunnisa

Universitas Nusa Putra

Email: gevira.halimatunnisa_mn22@nusaputra.ac.id

Article Info

Submitted: December 2025

Revised: December 2025

Accepted: December 2025

Published: December 2025

Keywords: ATR/BPN;
Pelayanan Publik;
Pengelolaan Pertanahan;
Pra-Internship; PTSL

Abstrak

Kegiatan pra-internship merupakan tahap awal pengalaman kerja nyata bagi mahasiswa sebelum memasuki program magang penuh. Artikel ini memaparkan refleksi kegiatan pra-internship yang dilaksanakan di Kantor Pertanahan Kota Sukabumi, yang berada di bawah naungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), pada periode Februari hingga Juni 2025. Tujuan penulisan ini adalah untuk menganalisis peran ATR/BPN dalam pengelolaan pertanahan, mendeskripsikan tahapan kegiatan yang dilaksanakan, serta mengidentifikasi kompetensi yang berkembang selama pra-internship berlangsung. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung, wawancara informal, partisipasi aktif, dan studi dokumentasi. Hasil menunjukkan bahwa Kantor Pertanahan Kota Sukabumi memiliki peran strategis dalam mewujudkan tertib administrasi pertanahan dan kepastian hukum kepemilikan tanah bagi masyarakat, yang diwujudkan antara lain melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), layanan sertifikat elektronik, serta program LARASITA. Berbagai kegiatan teknis-administratif yang diikuti mahasiswa selama pra-internship berhasil meningkatkan kompetensi teknis di bidang administrasi pertanahan sekaligus memperkuat soft skills berupa ketelitian, disiplin, dan kemampuan komunikasi dalam lingkungan birokrasi publik.

1. PENDAHULUAN

Tanah merupakan sumber daya alam yang bersifat vital dan strategis dalam kehidupan manusia. Tidak sekadar berfungsi sebagai tempat bermukim, tanah juga menjadi faktor determinan dalam aktivitas ekonomi, sosial, budaya, serta pembangunan infrastruktur nasional. Mengingat posisi tanah yang begitu sentral, pengelolaan pertanahan yang tertib, adil, dan berkelanjutan mutlak diperlukan guna menjamin kepastian hukum, keadilan distribusi, serta kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat. Dalam kerangka tersebut, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) hadir sebagai institusi negara yang mendapat mandat konstitusional untuk mengurus, mendaftarkan, dan mengawasi pengelolaan pertanahan secara profesional.

Permasalahan pertanahan di Indonesia memiliki kompleksitas yang tinggi, mencakup sengketa kepemilikan, tumpang tindih administrasi, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya sertifikasi tanah, hingga tantangan digitalisasi layanan publik. Kondisi ini mendorong ATR/BPN untuk terus berinovasi dalam memperbaiki kualitas pelayanan, salah satunya melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), penerbitan sertifikat elektronik, serta layanan jemput bola melalui program LARASITA (Layanan Rakyat untuk Sertifikasi Tanah). Program-program ini mencerminkan upaya konkret pemerintah dalam memperluas akses masyarakat terhadap kepastian hukum atas aset tanah yang mereka miliki (Kementerian ATR/BPN, 2022).

Program pra-internship merupakan komponen akademik wajib dalam kurikulum Study Completion Program (SCP) Jalur Internship di Universitas Nusa Putra. Melalui program ini, mahasiswa mendapatkan kesempatan untuk memperoleh pengalaman kerja nyata di lingkungan profesional sebelum memasuki pasar kerja secara penuh. Pelaksanaan



pra-internship di instansi pemerintah seperti Kantor Pertanahan Kota Sukabumi memberikan konteks yang unik bagi mahasiswa manajemen, karena mereka dapat mengamati secara langsung bagaimana prinsip-prinsip administrasi publik, manajemen sumber daya, dan pelayanan prima diterapkan dalam organisasi birokrasi.

Artikel ini ditulis dengan tiga tujuan utama: pertama, mendeskripsikan gambaran umum Kantor Pertanahan Kota Sukabumi sebagai instansi tempat pra-internship; kedua, menganalisis kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan selama pra-internship melalui pendekatan siklus identifikasi-implementasi-observasi-evaluasi; dan ketiga, mengkaji peningkatan kompetensi akademis dan profesional yang diperoleh mahasiswa dari pengalaman tersebut.

2. METODE

Penulisan artikel ini menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif yang berlandaskan pengalaman langsung kegiatan pra-internship di Kantor Pertanahan Kota Sukabumi. Lokasi kegiatan berada di Jl. Siliwangi No. 127, Kelurahan Cikole, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi, Jawa Barat. Periode pelaksanaan berlangsung dari tanggal 3 Februari 2025 hingga 30 Juni 2025, dengan jadwal kerja mengikuti ketentuan hari dan jam kerja yang berlaku di instansi tersebut.

Pengumpulan data dilakukan melalui empat metode yang saling melengkapi. Pertama, observasi langsung terhadap kegiatan operasional harian, yang memungkinkan penulis mengamati alur kerja nyata mulai dari proses pelayanan di loket, pengelolaan arsip, hingga kegiatan lapangan seperti LARASITA. Kedua, wawancara informal secara tidak terstruktur dengan sejumlah pegawai di berbagai divisi termasuk bagian pelayanan, pengukuran, dan pengarsipan—untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai tugas dan prosedur kerja yang tidak selalu terdokumentasi secara formal. Ketiga, partisipasi aktif dalam seluruh kegiatan teknis dan administratif yang ditugaskan oleh pembimbing lapangan, sehingga penulis memperoleh data empiris dari keterlibatan langsung. Keempat, studi dokumentasi melalui penelaahan terhadap dokumen internal instansi seperti buku tanah, berkas warkah, formulir PTSL, dan surat ukur elektronik (SUEL).

Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif melalui empat tahapan yang membentuk kerangka pembahasan utama artikel ini: tahap identifikasi (memetakan kondisi dan kebutuhan awal instansi), tahap implementasi (mendeskripsikan kegiatan yang dilaksanakan), tahap observasi (menganalisis temuan selama berlangsungnya kegiatan), dan tahap evaluasi (menilai capaian, tantangan, serta pembelajaran yang diperoleh).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Profil Perusahaan

Kantor Pertanahan Kota Sukabumi merupakan unit pelaksana teknis dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di tingkat kota. Secara historis, kelembagaan ATR/BPN telah mengalami perjalanan panjang sejak pertama kali urusan agraria ditangani oleh Departemen Dalam Negeri, hingga terbentuknya kementerian tersendiri melalui Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1955. Perkembangan lebih lanjut terjadi melalui berbagai restrukturisasi kelembagaan, termasuk penggabungan menjadi Subdirektorat Agraria pada 1972, perubahan menjadi Kantor Agraria pada 1979, hingga pembentukan BPN sebagai lembaga nasional yang berdiri mandiri di bawah Sekretariat Negara (Savira & Djajaputra, 2024).



Secara struktural, Kantor Pertanahan Kota Sukabumi dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang bertanggung jawab atas seluruh kegiatan operasional dan kebijakan pertanahan di wilayah kota. Di bawahnya terdapat Subbagian Tata Usaha yang bertugas mengelola urusan kepegawaian, keuangan, dan arsip administrasi. Struktur teknis kantor terdiri atas lima seksi utama: (1) Seksi Survei dan Pemetaan, yang menangani pengukuran, pemetaan, dan pengelolaan data spasial bidang tanah; (2) Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran, yang memproses administrasi hak atas tanah mulai dari permohonan hingga penerbitan sertifikat; (3) Seksi Pengaturan dan Pemberdayaan, yang mengatur pemanfaatan tanah sesuai tata ruang dan mendukung reforma agraria; (4) Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan, yang menangani pembebasan lahan untuk kepentingan umum; serta (5) Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa, yang bertugas menyelesaikan konflik pertanahan melalui mediasi dan koordinasi lintas instansi.

Visi Kantor Pertanahan Kota Sukabumi adalah terwujudnya penataan ruang dan pengelolaan pertanahan yang terpercaya dan berstandar dunia dalam mendukung Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian. Untuk mewujudkan visi tersebut, misi instansi mencakup penyelenggaraan penataan ruang dan pengelolaan pertanahan yang produktif, berkelanjutan, dan berkeadilan, serta penyelenggaraan pelayanan pertanahan yang berstandar dunia kepada seluruh lapisan masyarakat.

3.2 Tahapan Identifikasi

Pada tahap awal pelaksanaan pra-internship, dilakukan proses identifikasi terhadap kondisi aktual instansi dan kebutuhan yang dapat dipenuhi oleh mahasiswa pra-internship. Hasil identifikasi menunjukkan beberapa fakta penting. Pertama, Kantor Pertanahan Kota Sukabumi mengelola volume pekerjaan administrasi pertanahan yang sangat besar, terutama dalam pelaksanaan program PTSL yang mencakup ribuan bidang tanah dari berbagai kelurahan di Kota Sukabumi. Penginputan, verifikasi, dan pendataan nominatif berkas-berkas tersebut memerlukan tenaga tambahan yang terampil dan teliti.

Kedua, identifikasi menemukan adanya kebutuhan signifikan di bidang pengelolaan dan pengalihmediaan dokumen pertanahan. Ribuan buku tanah dan warkah yang tersimpan dalam format fisik perlu dikelola secara sistematis, termasuk proses pengambilan (mengebon), penyusunan ulang, dan pengarsipan kembali dokumen-dokumen tersebut. Proses ini sangat krusial karena dokumen-dokumen tersebut merupakan bukti legal kepemilikan tanah yang tidak tergantikan.

Ketiga, identifikasi menunjukkan bahwa program LARASITA sebagai layanan pertanahan keliling belum menjangkau seluruh kelurahan secara optimal. Banyak warga yang belum memahami prosedur pendaftaran tanah dan manfaat sertifikat elektronik. Kehadiran mahasiswa pra-internship dalam kegiatan LARASITA diharapkan dapat membantu petugas dalam mendiseminasikan informasi dan melayani masyarakat secara lebih efektif. Temuan-temuan ini menjadi dasar penugasan yang diberikan kepada mahasiswa selama pelaksanaan pra-internship.

3.3 Tahap Implementasi

Implementasi kegiatan pra-internship berlangsung selama lima bulan dengan melibatkan berbagai tugas teknis dan administratif yang berkaitan langsung dengan operasional Kantor Pertanahan Kota Sukabumi. Kegiatan pertama yang dilaksanakan adalah pembuatan dan pengelolaan data PTSL. Penulis dilibatkan dalam proses



penginputan dan pencocokan data nominatif berkas PTSL dari berbagai kelurahan—antara lain Gunung Puyuh, Dayeuhluhur, dan sejumlah kelurahan lainnya—ke dalam sistem digital. Kegiatan ini menuntut ketelitian tinggi dalam mencocokkan identitas pemilik tanah, koordinat bidang, dan nomor berkas agar tidak terjadi kesalahan administrasi yang dapat berujung pada permasalahan hukum.

Kegiatan kedua adalah proses pengalihmediaan atau digitalisasi dokumen tanah. Penulis membantu petugas dalam mengalihkan dokumen surat tanah dari format fisik ke dalam format digital, sekaligus menuliskan data ke dalam buku arsip penyerahan balik nama dan buku warkah. Kegiatan ini bertujuan untuk mempercepat transformasi digital arsip pertanahan sebagaimana yang diamanatkan oleh kebijakan nasional ATR/BPN (Kementerian ATR/BPN, 2021). Ketiga, kegiatan pencetakan sertifikat elektronik dan penulisan Surat Ukur Elektronik (SU-EL). Penulis terlibat dalam verifikasi data pada sistem sebelum sertifikat dicetak, memastikan kesesuaian informasi identitas pemilik, luas tanah, jenis hak, dan lokasi bidang tanah. Sertifikat yang dicetak dilengkapi dengan kode QR dan tanda tangan elektronik sebagai langkah pengamanan dokumen.

Keempat, partisipasi dalam program LARASITA keliling. Selama pra-internship, penulis turut serta dalam beberapa kegiatan LARASITA yang menasar langsung masyarakat di kelurahan-kelurahan tertentu. Dalam kegiatan ini, penulis membantu petugas dalam mendata masyarakat yang ingin mendaftarkan tanah, menjelaskan prosedur pendaftaran, serta memperkenalkan aplikasi Sentuh Tanahku sebagai sarana digital untuk memantau status layanan pertanahan. Kelima, pengelolaan loket layanan, yang mencakup pencetakan bukti layanan dan penginputan data permohonan masyarakat ke dalam sistem.

3.4 Tahap Observasi

Selama pelaksanaan implementasi kegiatan, sejumlah temuan penting berhasil diobservasi. Dalam aspek program PTSL, teridentifikasi bahwa koordinasi antarkelurahan dan keakuratan data bidang tanah menjadi faktor kritis yang menentukan kelancaran proses sertifikasi. Tidak jarang ditemukan ketidaksesuaian antara data fisik di lapangan dengan data yang tercatat dalam sistem, yang memerlukan proses klarifikasi dan pembaruan data sebelum dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya. Kondisi ini menegaskan pentingnya sistem verifikasi berlapis dalam pengelolaan data pertanahan.

Dalam aspek layanan elektronik, observasi menunjukkan bahwa program sertifikat elektronik mendapat respons yang cukup positif dari masyarakat yang memahami manfaat digitalisasi. Namun demikian, terdapat segmen masyarakat—terutama kelompok lanjut usia dan warga dengan akses teknologi terbatas—yang masih membutuhkan pendampingan intensif dalam memahami dan menerima format sertifikat digital. Program LARASITA keliling menjadi instrumen yang sangat efektif untuk menjangkau kelompok ini, karena petugas datang langsung ke komunitas warga dan memberikan penjelasan secara tatap muka.

Dari sisi manajemen internal, observasi terhadap pengelolaan arsip buku tanah dan warkah mengungkapkan betapa pentingnya sistem pengarsipan yang tertib dan terstruktur. Volume dokumen yang sangat besar—menjangkau ribuan bidang tanah dari berbagai era penerbitan—memerlukan sistem temu kembali yang handal. Keterlambatan dalam menemukan dokumen yang diperlukan dapat berdampak langsung pada kecepatan dan kualitas pelayanan kepada Masyarakat.



3.5 Tahap Evaluasi

Evaluasi terhadap kegiatan pra-internship dilakukan dari dua dimensi: evaluasi terhadap kinerja instansi dan evaluasi terhadap capaian kompetensi mahasiswa. Dari dimensi kinerja instansi, program PTSL yang dijalankan Kantor Pertanahan Kota Sukabumi terbukti memberikan dampak nyata bagi masyarakat dalam hal percepatan legalisasi aset tanah. Namun demikian, masih terdapat tantangan dalam hal kapasitas sumber daya manusia yang harus diimbangi dengan volume pekerjaan yang terus meningkat. Pemanfaatan mahasiswa pra-internship sebagai tenaga pendukung menjadi salah satu strategi pragmatis yang ditempuh instansi untuk mengatasi keterbatasan tersebut, sekaligus memberikan manfaat edukatif bagi mahasiswa.

Dalam hal transformasi digital, evaluasi menunjukkan bahwa penerapan sertifikat elektronik dan digitalisasi arsip merupakan langkah progresif yang perlu terus dipercepat. Sosialisasi kepada masyarakat perlu ditingkatkan agar program-program inovatif tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal oleh semua lapisan masyarakat, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan literasi digital. Program LARASITA terbukti menjadi jembatan penting yang mendekatkan layanan pertanahan kepada masyarakat yang tidak dapat mengakses kantor secara langsung.

Dari dimensi pengembangan kompetensi mahasiswa, pra-internship berhasil meningkatkan kemampuan teknis di bidang administrasi pertanahan, meliputi pengelolaan data PTSL, pemahaman prosedur penerbitan sertifikat elektronik, penulisan SU-EL, dan pengelolaan arsip. Di sisi soft skills, pengalaman berinteraksi dengan aparatur pemerintah dan masyarakat umum secara langsung telah mengasah kemampuan komunikasi interpersonal, membangun kedisiplinan kerja sesuai standar birokrasi, serta menumbuhkan tanggung jawab profesional dalam menangani dokumen-dokumen yang memiliki implikasi hukum.

4. KESIMPULAN

Pelaksanaan kegiatan pra-internship di Kantor Pertanahan Kota Sukabumi memberikan pengalaman akademis dan profesional yang sangat berharga bagi mahasiswa Program Studi Manajemen Universitas Nusa Putra. Instansi ini terbukti memainkan peran yang sangat strategis dalam mewujudkan kepastian hukum kepemilikan tanah bagi masyarakat, melalui berbagai program unggulan seperti PTSL, sertifikasi elektronik, dan LARASITA. Kegiatan-kegiatan teknis yang diikuti selama pra-internship—mulai dari pengelolaan data PTSL, digitalisasi arsip, pencetakan sertifikat elektronik, penulisan SU-EL, hingga partisipasi dalam layanan keliling LARASITA memberikan pemahaman komprehensif tentang mekanisme kerja lembaga pertanahan pemerintah.

Dari perspektif pengembangan mahasiswa, pra-internship berhasil memperkuat dua dimensi kompetensi secara simultan. Dimensi hard skills meliputi kemampuan administrasi pertanahan, pengelolaan sistem digital ATR/BPN, dan manajemen dokumen arsip. Dimensi soft skills mencakup ketelitian, kedisiplinan, tanggung jawab, komunikasi profesional dalam lingkungan birokrasi, serta kemampuan adaptasi terhadap dinamika kerja di instansi pemerintah. Secara keseluruhan, program pra-internship terbukti menjadi wahana yang efektif dalam mengintegrasikan pengetahuan teoritis perkuliahan dengan realitas praktik dunia kerja, sekaligus mempersiapkan mahasiswa menghadapi tantangan karier di sektor publik maupun swasta.



5. PERSANTUNAN

Penulis menyampaikan terima kasih yang tulus kepada Bapak Ikmalul Miftah Z., MBA selaku Pembimbing Utama atas bimbingan, arahan, dan dukungan yang diberikan selama penyusunan laporan ini. Apresiasi yang setinggi-tingginya juga disampaikan kepada seluruh pimpinan dan staf Kantor Pertanahan Kota Sukabumi (ATR/BPN) atas kesempatan yang diberikan, sambutan yang hangat, serta bimbingan teknis selama pelaksanaan pra-internship berlangsung. Terima kasih kepada Ibu Ana Yuliana Jasuni, M.M. selaku Ketua Program Studi Manajemen atas dukungan kelembagaan yang diberikan. Tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada segenap civitas akademika Universitas Nusa Putra yang telah memfasilitasi pelaksanaan program Study Completion Program (SCP) Jalur Internship ini.

REFERENSI

- Kementerian ATR/BPN. (2022). *Pedoman Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)*. Jakarta: Direktorat Jenderal Hubungan Hukum Keagrariaan.
- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. (2021). *Peraturan Menteri ATR/BPN No. 16 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik*. Jakarta: ATR/BPN RI.
- Savira, J., & Djajaputra, G. (2024). The role of the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency (ATR/BPN) as a government institution facilitating the electronic land certificate policy. *Jurnal Hukum Agraria*, 4(4), 717–722.
- Garut, D. I. K. (2019). Implementasi kebijakan pemerintah di bidang pendaftaran tanah sistematis lengkap di Kabupaten Garut. *Jurnal Hukum Publik*, 2(2), 43–53.
- Dinasty, D., & Rianto, D. (2020). Analisis internship bagi peningkatan kompetensi mahasiswa. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 8(1), 45–54.
- Jurnal Administrasi Publik. (2025). Evaluation of public service performance and public satisfaction. *Jurnal Administrasi Publik*, 23(2), 472–489.